



PERAN EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY) DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA (STUDI DI PROVINSI LAMPUNG)

THE ROLE OF GREEN ECONOMY IN PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA (A STUDY IN LAMPUNG PROVINCE)

Raditya Aldiansyah¹, Dany Ferdinansyah²

Program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: raditaldi29@gmail.com¹, danyferdinansyah4@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 10-11-2025

Revised : 12-11-2025

Accepted : 14-11-2025

Pulished : 16-11-2025

Abstract

Growth-oriented economic development without regard for environmental balance has given rise to serious problems such as ecosystem damage, social inequality, and increased carbon emissions. To address these challenges, the concept of a green economy emerges as a strategy that balances economic growth, social welfare, and environmental sustainability. This study aims to analyze the role of a green economy in promoting sustainable development in Indonesia, focusing on Lampung Province as a case study. The study used a descriptive qualitative approach using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for the 2020–2024 period, covering economic, social, and environmental indicators. The analysis was conducted descriptively to illustrate trends and the green economy's contribution to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The results show that the implementation of a green economy contributes positively to resource efficiency, an increase in the human development index, a reduction in carbon emissions, and the growth of the renewable energy sector. However, challenges remain, including limited intersectoral coordination, low regional institutional capacity, and social inequality in the adoption of green technology. In conclusion, a green economy is a crucial strategy for accelerating the transition to inclusive, low-carbon sustainable development in Indonesia if supported by policy synergy, cross-sectoral collaboration, and active community participation.

Keywords: *Green Economy, Sustainable Development, Indonesia*

Abstrak

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan telah menimbulkan permasalahan serius seperti kerusakan ekosistem, ketimpangan sosial, dan meningkatnya emisi karbon. Untuk mengatasi tantangan tersebut, konsep ekonomi hijau (green economy) hadir sebagai strategi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi hijau dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada Provinsi Lampung sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, meliputi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tren dan kontribusi ekonomi hijau terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau berkontribusi positif terhadap efisiensi sumber daya, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan emisi karbon, serta pertumbuhan sektor energi terbarukan. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan koordinasi



antar sektor, rendahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan ketimpangan sosial dalam adopsi teknologi hijau. Kesimpulannya, ekonomi hijau merupakan strategi penting dalam mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan rendah karbon di Indonesia apabila didukung oleh sinergi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci : Ekonomi Hijau (Gren Economy), Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global tidak terlepas dari tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi, dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini menuntut perubahan paradigma pembangunan dari yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan menuju model yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau muncul sebagai solusi alternatif untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Konsep ini mengacu pada pembangunan yang efisien dalam penggunaan sumber daya, rendah karbon, dan menjamin kesejahteraan sosial. Dalam konteks global, ekonomi hijau telah menjadi pilar penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan (Марьин 2020); (Эдилова and others 2023).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau karena masih bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam. Ketergantungan ini meningkatkan risiko degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial, sehingga transisi menuju ekonomi hijau menjadi keharusan strategis (qizi Akbarova 2022).

Provinsi Lampung menjadi contoh menarik dalam penerapan ekonomi hijau karena memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di wilayah ini berpotensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ramah lingkungan seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta energi terbarukan (M. L. A. Kurniawan and Suripto 2022).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Pusat Statistik (BPS) berperan penting dalam penyediaan data yang relevan untuk memantau capaian SDGs di tingkat nasional dan daerah (Marcal, Oentoro, and Yasin 2024).

Secara teoritis, ekonomi hijau berakar pada pemikiran ekonomi ekologis yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi. Teori ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh mengabaikan nilai ekosistem, modal alam, dan jasa lingkungan yang menopang kehidupan manusia (Harris 2023).

Selain dimensi ekonomi dan lingkungan, aspek sosial juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi hijau. Kebijakan pembangunan harus memastikan keadilan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi agar transisi menuju ekonomi hijau tidak memperbesar ketimpangan sosial (Kuznecov and Nebol'sina 2022).

Meskipun demikian, implementasi ekonomi hijau di Indonesia masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas daerah, dan kurangnya



koordinasi antar sektor (Rusli 2020) (Nurlambang 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma menuju tata kelola pembangunan yang partisipatif dan berbasis ekologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi hijau dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Provinsi Lampung. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kontribusi, tantangan, serta prospek penerapan ekonomi hijau di tingkat daerah sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024. Data yang dianalisis meliputi indikator ekonomi seperti PDRB dan tingkat kemiskinan, indikator sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan, serta indikator lingkungan seperti emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan.

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan tren dan pola hubungan antara ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi empiris. Pendekatan ini merujuk pada metode penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Szabo dan Strang (1997), di mana data sekunder digunakan untuk menggali makna fenomena tanpa manipulasi variabel.

Fokus wilayah penelitian berada di Provinsi Lampung karena daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dan sektor pertanian hijau, sekaligus mencerminkan tantangan khas daerah berkembang dalam transisi menuju ekonomi hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Indikator Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung (2020–2024)

Indikator	2020	2022	2024	Sumber Data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,10	71,40	72,60	BPS Lampung
Tingkat Kemiskinan (%)	12,60	11,20	10,10	BPS Lampung
Emisi Karbon per Kapita (ton CO ₂)	1,68	1,55	1,47	BPS & KLHK
Proporsi Energi Terbarukan (%)	11,20	13,60	15,10	Bappenas/BPS
Kontribusi Pertanian Berkelanjutan terhadap PDRB (%)	22,40	24,00	25,60	BPS Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung dan Bappenas (data diolah, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam beberapa indikator utama pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Peningkatan Indeks Pembangunan



Manusia (IPM) dari 70,10 menjadi 72,60 dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau. Peningkatan ini mencerminkan dampak kebijakan pembangunan berbasis keberlanjutan yang diimplementasikan secara bertahap melalui pendekatan terintegrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk menguatkan temuan awal tersebut, capaian peningkatan IPM di Lampung sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan reformasi kebijakan pembangunan hijau yang mulai mengaruskutamakan efisiensi sumber daya, inklusi sosial, dan pengendalian emisi sebagai satu paket kebijakan daerah. Integrasi prinsip ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus menjaga daya dukung lingkungan, terutama ketika didukung oleh instrumen perencanaan-spasial dan penganggaran yang sensitif iklim (United Nations Development Programme 2022) (Organisation for Economic Co-operation and Development 2021), (Bappenas 2024). Pengalaman berbagai negara dan daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan biasanya muncul ketika pemerintah daerah mampu menyatukan dimensi kesejahteraan, produktivitas hijau, dan tata kelola transparan dalam satu kerangka *green growth* (Harris 2023) (Horwitz 2014). Dalam konteks Lampung, kombinasi antara program lingkungan berbasis masyarakat, peningkatan investasi energi terbarukan, dan perluasan praktik pertanian rendah emisi menjadi faktor pendorong yang membuat kenaikan IPM selaras dengan perbaikan indikator lingkungan dan sosial (World Bank 2023) (Global Green Growth Institute 2021). Selain itu, penguatan kolaborasi antarpelaku—pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta—menciptakan ekosistem pembelajaran kebijakan yang membuat inovasi hijau lebih mudah direplikasi lintas kabupaten (Abdullah 2024) (Kundu 2022). Kerangka kooperasi sekaligus kompetisi (*coopetition*) yang diusulkan dalam literatur pembangunan hijau juga relevan diterapkan di Lampung karena memungkinkan daerah memanfaatkan transfer teknologi dan pendanaan hijau tanpa kehilangan kedaulatan perencanaan (Carfi and Schilirò 2011).

Penurunan tingkat kemiskinan dari 12,60% menjadi 10,10% mencerminkan efek sosial positif dari kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat melalui sektor energi terbarukan dan pertanian organik memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hijau dan peningkatan pendapatan rumah tangga (Arifin, Basri, and Herianti 2024). Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor-sektor tersebut, ketahanan ekonomi daerah semakin meningkat, sejalan dengan prinsip inklusivitas yang menjadi landasan pembangunan berkelanjutan.

Penurunan emisi karbon dari 1,68 ton CO₂ per kapita pada tahun 2020 menjadi 1,47 ton CO₂ pada tahun 2024 menandakan adanya kemajuan dalam efisiensi energi dan penerapan teknologi rendah karbon. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan energi terbarukan yang mencapai 15,10% pada 2024 (Setty 2025). Upaya transisi energi ini sejalan dengan kebijakan nasional menuju net zero emission 2060 dan menunjukkan bahwa Lampung berperan aktif dalam dekarbonisasi sektor energi daerah.

Kontribusi sektor pertanian berkelanjutan terhadap PDRB meningkat dari 22,40% menjadi 25,60%, menandakan bahwa pertanian hijau semakin diakui sebagai pilar ekonomi daerah. Pendekatan agroekologi dan penggunaan pupuk organik mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, sekaligus menjaga produktivitas lahan (M. L. A. Kurniawan and Suripto 2022). Dengan



adopsi praktik ini, Lampung menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan tanpa menurunkan daya saing sektor pertanian.

Secara sosial, ekonomi hijau di Lampung juga memperluas kesempatan kerja di sektor energi bersih, pengelolaan limbah, dan industri daur ulang. Program pelatihan tenaga kerja hijau yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam sektor ramah lingkungan (Muang-iam and others 2025). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga membangun kapasitas sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Namun, tantangan tetap ada. Ketimpangan kapasitas antar kabupaten dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ekonomi hijau di tingkat daerah. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pendanaan untuk proyek energi hijau (Nurlambang 2020). Selain itu, keterlambatan dalam penerapan sistem pemantauan emisi serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga menurunkan efektivitas implementasi kebijakan (Rusli 2020).

Untuk memastikan bahwa deretan capaian tersebut tidak bersifat sesaat dan dapat dikonversi menjadi pertumbuhan hijau yang konsisten, Lampung perlu memperkuat ekosistem pembiayaan dan tata kelola proyek hijau yang terhubung dengan instrumen nasional maupun global mulai dari *green bond* daerah, skema *blended finance*, hingga pembayaran berbasis kinerja lingkungan. Seluruh instrumen itu hanya akan diakui pasar dan lembaga donor bila didukung sistem MRV (measurement, reporting, verification) yang kredibel, sehingga reduksi emisi, rehabilitasi lahan, dan peningkatan energi terbarukan bisa dihitung sebagai nilai ekonomi, bukan sekadar laporan administrative (Bappenas 2024), (UNDP 2022) (World Bank 2023). Penyelarasan RPJMD dengan target NDC dan SDGs akan memperjelas prioritas investasi hijau dan mencegah duplikasi anggaran (OECD 2021), (Global Green Growth Institute 2021), sementara penguatan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek yang *bankable* akan membuka ruang keterlibatan sektor swasta di energi bersih dan pengelolaan limbah (International Finance Corporation 2022) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa daerah yang mampu menggabungkan transparansi lingkungan, instrumen fiskal hijau, dan kemitraan multipihak umumnya lebih cepat menarik investasi rendah karbon (UNEP 2022), (International Energy Agency 2023) (IPCC 2022) (Asian Development Bank 2024).

Penguatan ekonomi hijau di Lampung karena itu menuntut adanya sistem tata kelola data lingkungan dan kinerja pembangunan yang lebih terpadu agar setiap capaian—IPM, penurunan emisi, hingga ekspansi sektor pertanian hijau dapat dilacak dan dievaluasi secara berkala. Integrasi basis data lintas OPD, pemanfaatan instrumen penganggaran hijau (*green budgeting*), serta pelaporan berstandar SDGs akan memudahkan penajaman target dan koreksi dini terhadap program yang tidak efektif (Bappenas 2024). Selain itu, praktik pemantauan berbasis indikator hijau yang direkomendasikan lembaga internasional menunjukkan bahwa daerah yang konsisten melakukan *environmental performance tracking* cenderung memiliki kinerja dekarbonisasi dan inklusi sosial yang lebih stabil (UNEP 2022). Pengalaman negara dan daerah yang sukses menerapkan *green growth framework* juga menegaskan bahwa transparansi data dan partisipasi publik adalah dua syarat agar ekonomi hijau tidak berhenti di dokumen kebijakan, tetapi berujung pada perbaikan nyata di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha lokal (OECD 2021).



Peningkatan indikator pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan pembangunan sektoral. Program seperti *Lampung Green Province* dan *Gerakan Lampung Bersih* menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong praktik ramah lingkungan (A. Kurniawan and Supriadi 2023). Kolaborasi lintas sektor ini mendukung realisasi tujuan SDGs terutama pada aspek energi bersih, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Abdullah 2024) (Sahal and others 2023). Hasil capaian ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diimplementasikan secara praktis dalam kebijakan daerah, terutama di Lampung yang memiliki potensi besar dalam pertanian dan energi biomassa (Arifin, Basri, and Herianti 2024).

Selain itu, faktor penting lain yang mendorong peningkatan kinerja ekonomi hijau di Lampung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi dari sumber daya alam yang lestari. Pendidikan lingkungan dan sosialisasi ekonomi hijau di tingkat komunitas telah menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya efisiensi energi dan pengurangan limbah (Muang-iam and others 2025), (Widiastuti, Hartono, and Prasetyo 2023). juga menunjukkan bahwa tingkat literasi hijau masyarakat berkorelasi positif dengan partisipasi mereka dalam kegiatan daur ulang dan pemanfaatan energi alternatif. Upaya ini didukung oleh lembaga pendidikan tinggi di Lampung yang mulai memasukkan kurikulum keberlanjutan dalam program studi pertanian dan teknik lingkungan (Rahayu and Nurliana 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa transformasi menuju ekonomi hijau harus disertai perubahan perilaku sosial dan sistem pendidikan yang adaptif (Carfi and Schilirò 2011).

Dari sisi ekonomi, penerapan kebijakan pajak lingkungan dan insentif hijau mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan investasi hijau di sektor energi dan pengelolaan limbah (Hyder 2015) (Harris 2023). Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2024). mencatat bahwa Lampung menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat dalam investasi energi surya dan biomassa di Sumatra. Investasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor teknologi hijau (Kuznecov and Nebol'sina 2022). Dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi dari inovasi hijau, ekonomi daerah Lampung menjadi lebih tangguh terhadap fluktuasi global, seperti krisis energi dan perubahan harga komoditas (Dariah and others 2019).

Namun demikian, tantangan implementasi ekonomi hijau masih signifikan. Permasalahan struktural seperti rendahnya kemampuan fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi kendala dalam pendanaan proyek hijau (Nurlambang 2020) (Rusli 2020). Selain itu, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, serta kurangnya sistem insentif bagi sektor swasta, sering menghambat inovasi berkelanjutan (Arifin, Basri, and Herianti 2024). (Sitorus and Sinaga 2024). mencatat bahwa sektor industri di Lampung masih menghadapi kesulitan beradaptasi dengan regulasi emisi karena kurangnya teknologi bersih dan biaya implementasi yang tinggi. Hal ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas teknis dan dukungan kebijakan fiskal yang memadai agar transisi ekonomi hijau dapat berjalan inklusif dan efisien (Harris 2023) (Setty 2025).

Ke depan, arah pembangunan berkelanjutan di Lampung harus memperkuat integrasi antara kebijakan ekonomi hijau dengan tata kelola ruang dan sumber daya. Pendekatan *green governance*



diperlukan untuk menjamin transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan (Kundu 2022). Pemerintah perlu memperluas kerjasama global dan antar daerah dalam pertukaran teknologi ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip *coopetition* internasional yang diuraikan oleh (Carfi and Schilirò 2011). Selain itu, pelibatan sektor swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR hijau) dan skema pembiayaan karbon dapat mempercepat pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060 (Arifin, Basri, and Herianti 2024). Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau di Lampung dapat menjadi model pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi masa depan.

Meskipun masih menghadapi hambatan teknis dan struktural, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi hijau di Lampung selaras dengan kerangka SDGs dan prinsip keadilan antar generasi. Ekonomi hijau tidak hanya berperan sebagai alat mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga sebagai paradigma baru pembangunan yang menempatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama (Abdullah 2024), (Cato 2012), (Harris 2023).

KESIMPULAN

Ekonomi hijau terbukti memiliki kontribusi penting dalam mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, dan pengurangan emisi karbon menjadi bukti konkret bahwa pendekatan ini mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun masih terdapat hambatan seperti lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan kapasitas daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau adalah strategi yang efektif dan berkelanjutan apabila didukung oleh sinergi kebijakan, komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan hijau yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2024. “Sustainable Development Goals and Intergenerational Equity.” *Journal of Sustainable Policy Studies*.
- Arifin, M, H Basri, and D Herianti. 2024. “Renewable Energy Transition in Indonesia.” *Indonesian Journal of Environmental Economics*.
- Asian Development Bank. 2024. “Innovative Climate Financing for Provinces and Cities in Asia.”
- Bappenas. 2024. “Pedoman Penganggaran Hijau Untuk Pemerintah Daerah.”
- Carfi, D, and D Schilirò. 2011. “Coopetition and Green Growth.” *Theoretical Economics Letters* 1: 1–5.
- Cato, M S. 2012. *The Green Economy: Principles and Practices*. Routledge.
- Dariah, A, and others. 2019. “Strategic Planning for Sustainable Development in Indonesia.” *Indonesian Development Planning Review*.
- Global Green Growth Institute. 2021. “Mobilizing Green Investment through Subnational Projects.”
- Harris, J. 2023. *Green Economy and Market Mechanisms*. Earthscan.
- Horwitz, Steven. 2014. “Deflation: The Good, the Bad, and the Ugly.” *Cato Journal* 34(2): 349–64.
- Hyder, A. 2015. “Balancing Growth and Environmental Sustainability.” *Environmental Economics*



Review.

- International Energy Agency. 2023. "Local Clean Energy Investment Outlook 2023."
- International Finance Corporation. 2022. "Designing Bankable Green Projects for Cities."
- IPCC. 2022. "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change."
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2024. "Laporan Investasi Energi Terbarukan 2024."
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2024. "Laporan Investasi Energi Terbarukan Indonesia 2020–2024."
- Kundu, N. 2022. "Global Cooperation in Sustainable Development." *World Sustainability Journal* 12(4): 43–57.
- Kurniawan, A, and S Supriadi. 2023. "Green Provincial Policy Implementation in Indonesia: Case Study of Lampung." *Journal of Public Policy Studies* 18(2): 200–214.
- Kurniawan, Mahrus Lutfi Adi, and Suripto. 2022. "Gerakan Bantul Bersama Dan Ekonomi Hijau." *Jurnal Pembangunan Daerah Berkelanjutan*.
- Kuznecov, A, and T Nebol'sina. 2022. "Social Justice in Green Economy Policies." *European Journal of Green Policy Studies*.
- Marcal, Ivonia Auxiliadora Freitas, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin. 2024. "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2(3): 40–47. doi:10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898.
- Muang-jam, P, and others. 2025. "Community Participation in Sustainable Development." *Journal of Environmental Education Research*.
- Nurlambang, T. 2020. "Environmental Strategic Assessment in Indonesia." *Journal of Regional Development Policy*.
- OECD. 2021. "Green Growth and Sustainable Regional Development."
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2021. "Green Budgeting and Subnational Governments."
- qizi Akbarova, N. 2022. "Green Economy as a Path to Sustainable Development." *Central Asian Economic Review*.
- Rahayu, F, and D Nurliana. 2024. "Environmental Literacy and Green Curriculum in Indonesian Universities." *Asian Journal of Sustainability Education* 6(2): 55–70.
- Rusli, M. 2020. "Environmental Law Enforcement and Economic Policy." *Indonesian Journal of Law and Environment*.
- Sahal, R, and others. 2023. "The Role of SDGs in Global Sustainability Frameworks." *Global Development Journal*.
- Setty, A. 2025. "Technological Innovation for Green Economy Efficiency." *International Journal of Renewable Energy Research*.
- Sitorus, M, and T Sinaga. 2024. "Socioeconomic Gaps and Environmental Degradation in Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Lingkungan*.
- UNDP. 2022. "Financing the SDGs at Subnational Level: Instruments and Country Experiences."



- UNEP. 2022. "Measuring Environmental Performance at Subnational Level."
- United Nations Development Programme. 2022. "Financing the SDGs at Subnational Level: Instruments and Country Experiences."
- Widiastuti, E, B Hartono, and A Prasetyo. 2023. "Community Awareness and Green Economy Implementation in Rural Indonesia." *Sustainability Perspectives Journal* 8(1): 11–28.
- World Bank. 2023. "Indonesia Economic Prospects: Maintaining Growth Amid Price Pressures."
- Марьин, С. 2020. "Ecological Economics and Natural Capital Theory." *Environmental Economics and Policy Journal*.
- Эдилова, З, and others. 2023. "Economic-Ecological Interdependence Theory." *International Journal of Green Economics*.